

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI KE PROVINSI DKI JAKARTA PADA RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020-2021

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Kunjungan Kerja

1. Hasil Rapat Koordinasi antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Rapat Internal Komisi III DPR RI;
4. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ke Provinsi DKI Jakarta.

II. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan.

III. Susunan Tim

Terlamir

V. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 5 (lima) hari, yaitu dari tanggal 15–19 Februari 2021.

V. Objek Kunjungan Kerja

Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang kemudian dilanjutkan dengan Pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI JAKARTA beserta jajarannya, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya beserta jajarannya dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Kepala Tinggi Pengadilan Militer Utama beserta jajarannya.

B. HASIL KUNJUNGAN KERJA RESES PROVINSI DKI JAKARTA

1. PERTEMUAN DENGAN KAKANWIL KEMENKUMHAM PROVINSI DKI JAKARTA

Kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang kemudian dilanjutkan Pertemuan dengan Kakanwil Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi DKI Jakarta pada Kamis, tanggal 18 Februari 2021. Kantor Wilayah DKI Jakarta mempunyai 27 satuan kerja.

A. ANGGARAN

1. Penjelasan terkait dengan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 serta kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Pagu awal sebesar Rp. 539.868.523.000,- Pagu Akhir sebesar Rp. 574.656.592.000 dan Realisasi sebesar Rp. 547.473.569.809 atau sebesar 95,23 %.
2. Kendala-kendala yang dihadapi :
 - a. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir
 - b. Terdapat anggaran sebesar Rp 20.372.744.950,- pada 7 Kantor Imigrasi Rudenim Jakarta dan BHP Jakarta yang bersumber dari PNBPN yang tidak bisa digunakan akibat target PNBPN tidak tercapai.
3. Penjelasan terkait Pagu Definitif Tahun Anggaran 2021 dan program-program yang akan dilaksanakan. Demikian pula kebutuhan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkumham di Provinsi DKI Jakarta. Jumlah Alokasi anggaran Tahun 2021 Jajaran Kantor Wilayah.
4. Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Pagu Awal tahun 2021 sebesar Rp.759.04.938.0, Penghematan sebesar Rp.3.187.472.000,- Pagu Penghematan sebesar Rp.755.817.466.000,-.
5. Program – program yang akan dilaksanakan :
 - a) Pembinaan mental kepada 1.046 petugas pengamanan di Lapas/Rutan dan Pegawai Kantor Imigrasi.
 - b) Rehab medis dan Rehab sosial serta pembinaan kemandirian di Lapas /Rutan di wilayah DKI Jakarta
 - c) Pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong seluruh UPT di wilayah DKI Jakarta untuk memperoleh predikat WBK / WBBM.
 - d) Penguatan pengawasan orang asing dalam rangka mengamankan kepentingan nasional
 - e) Bantuan hukum kepada masyarakat miskin

f) Penanganan Covid-19

C. PENGAWASAN

1. Penjelasan terkait data mengenai petugas dan penghuni Lapas/Rutan yang terinfeksi Covid-19. Data akumulasi sampai dengan tanggal 10 Februari 2021 ditemukan sebanyak 445 kasus terkonfirmasi Covid-19 terdiri dari 420 orang pegawai dan 25 orang PPNPN, meninggal sebanyak 2 orang dan kasus ulangan sebanyak 3 orang. Data akumulasi WBP yang terkonfirmasi Covid sampai dengan tanggal 10 Februari 2021 sebanyak 300 orang.
2. Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a) Memperkuat tenaga kesehatan di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dengan membentuk Perhimpunan Tenaga Kesehatan (PERNAKES) DKI Jakarta sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Nomor W.10- 2153.KP.08.04 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020 Tentang Pembentukan Perhimpunan Tenaga Kesehatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
 - b) Melakukan Sinergitas antara penyuluh yang ada di Kanwil DKI Jakarta dan BPHN dengan kepolisian dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengadakan sosialisasi ke beberapa check point, Kalimalang, Cililitan, Depok, Kalideres.
 - c) Membentuk Satgas COVID-19 di tingkat Kantor Wilayah maupun setiap UPT Pemasyarakatan serta menyusun Rencana Kontijensi kewaspadaan menghadapi Pandemi Covid-19 pada Rutan, Lapas, LPKA dan RS Pengayoman Cipinang.
 - d) Menyusun Buku Strategi Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta dan mensosialisasikannya di lingkungan Rutan, Lapas LPKA dan RS Pengayoman.
 - e) Memperkuat logistik alat-alat Kesehatan dengan melakukan jejaring Kerjasama antar instansi pemerintah (Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan, BNPB) dan swasta (Yayasan Buddha Tzu Chi, Yayasan BTP, Lion Club).

- f) Penerapan Strategi Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease meliputi 4 pilar, yaitu; Pilar Managerial; Pilar Administrasi; Pilar Komunikasi dan Edukasi d) Pilar Monitoring dan Evaluasi.
- g) Memperkuat 3T (*Test Tracing Treatment*), dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- Melakukan pemeriksaan swab PCR kepada seluruh pegawai di lingkungan UPT Kanwil Kemenkumham DKI bekerjasama dengan RSUD Taman Sari.
 - Melakukan pemeriksaan random sampling menggunakan RDT (Rapid Test) Covid-19 pada Wargabinaan Pemasarakatan dari tanggal 16 – 18 September 2020. Dari total sampel 2.323 WBP terdapat 438 orang yang hasilnya menunjukkan hasil reaktif (18.85%).
 - Meningkatkan kapasitas tenaga Kesehatan dalam penegakan diagnosa COVID-19 dengan memberikan pelatihan OJT Swab PCR bekerjasama dengan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur dan Puskesmas Cempaka Putih.
 - Membuka jejaring Kerjasama dengan BBLK (Balai Besar Laboratorium Kesehatan) Jakarta dalam pemeriksaan sample swab PCR COVID19 sehingga setiap Lapas Rutan di Wilayah Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dapat melakukan pemeriksaan swab PCR secara mandiri yang menegakan diagnosa secara cepat.
 - Melakukan tracing secara ketat apabila ditemukan pegawai maupun wargabinaan yang positif
 - Menempatkan wargabinaan yang positif dengan tanpa gejala, gejala ringan pada blok khusus isolasi covid di masing-masing Lapas Rutan.
 - Melakukan rujukan ke RS Pengayoman, RS Polri, RSD Wisma Atlet pada WBP dengan gejala sedang dan berat.
 - Melakukan refocusing anggaran dan permintaan tambahan anggaran untuk memperkuat alkes penanggulangan dan pengendalian COVID di lingkungan UPT Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta
 - Melakukan screening masal pada seluruh pegawai di lingkungan UPT Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dari tanggal 4 Januari

2021 – 28 Januari 2021 mengantisipasi libur Natal dan Tahun Baru 2021.

- Penerapan sistem kerja *work from office (WFO)* sebanyak 25% dan *work from home (WFH)* sebanyak 75% pegawai serta memberlakukan *lockdown* pada UPT dengan jumlah pegawai positif COVID19 diatas 5%.
- Menetapkan Rumah Sakit Pengayoman Cipinang sebagai Tempat Penanganan Pasien terkonfirmasi Corona *Virus Disease* (Covid-19) dengan gejala ringan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta.

3. Upaya dan kebijakan yang telah dilakukan dalam rangka mengurangi permasalahan kepadatan penghuni (Overcrowded) di LP/Rutan dan meningkatkan keamanan LP/Rutan.

- a) Melaksanakan Pemindahan (Redistribusi) Narapidana Tahun 2020.Redistribusi narapidana didalam wilayah DKI Jakarta melalui Persetujuan Kepala Kantor Wilayah : 1.527 orang.
- b) Redistribusi narapidana keluar wilayah DKI Jakarta melalui Persetujuan Direktur Jenderal Pemasarakatan sebanyak : 213 orang
- c) Melaksanakan Asimilasi Dirumah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI dan melakukan Percepatan pemberian dan pengeluaran Hak Integrasi (PB, CB, CMB, CMK, Asimilasi kerja Sosial). Asimilasi sebanyak 2.625 sedangkan PB,CB dan CMB sebanyak 7.230 orang.
- d) Perlu kami sampaikan data jumlah Penghuni Lapas/Rutan Wilayah DKI Jakarta adalah Kapasitas 5.863 orang, jumlah napi 12.367 orang, tahanan 4.816 orang jumlah total 17.182 atau 293.06
- e) Dalam peningkatan keamanan pada Lapas/Rutan di Wilayah DKI Jakarta melakukan Inspeksi Mendadak dan melakukan Deteksi Dini gangguan keamanan secara Periodik setiap bulannya secara rutin maupun Insidentil..
- f) Dilakukan test urine sewaktu waktu dalam rangka pencegahan dan pengawasan peredaran dan pemakaian narkoba baik oleh pegawai lapas / rutan maupun penghuni.

4. Terkait pelaksanaan fungsi keimigrasian dalam pengawasan orang asing serta pencegahan penyalahgunaan izin tinggal orang asing dan tenaga kerja asing secara illegal yang telah dilakukan, maupun dalam kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi permasalahan orang asing

atau tenaga kerja asing illegal. Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian dalam Pengawasan Orang Asing dilakukan mulai dari sebelum masuk wilayah Indonesia; ketika masuk wilayah Indonesia serta; keberadaan/kegiatan Orang Asing Selama berada di wilayah Indonesia.

5. Terkait data Orang Asing di wilayah DKI Jakarta dari bulan Januari sd Desember Tahun 2021 yaitu Jumlah Tenaga Kerja Asing sebanyak 34.324 WNA. Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa deportasi sebanyak 904 WNA (Penyalahgunaan Izin Tinggal, Overstay, selesai melaksanakan hukuman tindak pidana umum). Projustitia sebanyak 5 WNA (WNA yang melanggar Tindak Pidana Keimigrasian)

Pendalaman/ Tanya Jawab:

Pada sesi peendalaman Anggota Tim Komisi III DPR RI menyampaikan beberapa hal:

- Terkait Orang Asing yang ada di Kanwil DKI Jakarta, apa latar belakang Orang Asing melakukan pelanggaran yang semakin hari semakin meningkat, Bagaimana koordinasi dengan antar penegak hukum lainnya?
- Terkait dengan peredaran narkoba di Lapas yang menjadi sorotan publik akhir-akhir ini di berbagai media dan apa yang dilakukan Kakanwil dalam hal ini?
- Apresiasi kepada devisi imigrasi yang bisa meringkus 2 (dua) orang WNA beberapa waktu lalu, terkait kekurangan Sumber Daya Manusia, apa saja yang dilakukan Kakanwil DKI. Jakarta dalam menyelesaikan masalah SDM.
- Terkiat data tenaga kerja Orang Asing di tahun 2020 dan 2021, apakah ada data TKA dibidang? Bagaimana target PNBP tahun 2021?
- Terkait dengan scanning yang rusak perlu menjadi inisiatif kakanwil terutama di Lapas. Pegawai LP yang sudah lama dan riskan akan penyalahkan wewenang.
- Penjelasan terkait masalah demo kantor Kakanwil DKI Jakarta yang menuntut pertanggungjawaban Kakanwil?
- Terkait dengan Tenaga Kesehatan dilapas/ Rutan belum dilakukan Vaksin Covid-19 karena merupakan garda terdepan.
- Persoalan dilapas napi melakukan transaksi narkoba mohon dijelaskan? Serta rincian WNA yang masuk DKI Jakarta.
- Apakah ada warga negara Israel di Indonesia? berapa yang bekerja didunia hiburan? TKA yang KITAS ada yang memiliki badan usaha di Indonesia, Visa Kunjungan/ Wisata akan tetapi bekerja dan membuat usaha di Indonesia.
- Masalah Over Crowded di lapas perlu dicarikan solusi seperti bagi tahanan yang sedikit tidak perlu ditahan.

- Terkait Anggaran Kakanwil cukup bagus, sebenarnya apa yang terjadi di kakanwil DKI Jakarta saat pandemi beberapa hari yang lalu. Sepertinya Kakanwil meminta pertanggungjawaban terkait narkoba di Lapas? Banyak penangkapan narkoba yang bersumber dari cipinang? Ada fenomena apa karena dilihat dari anggaran cukup bagus.

Jawaban/ Tanggapan :

- Terkait dengan permasalahan demonstrasi terjadi mana kala ada bandar narkoba besar selama ini sampai 9 kakanwil belum bisa dipindahkan dari lapas cipinang, ini menjadi motivasi kakanwil untuk melaksanakan tugas di kanwil DKI Jakarta ini. Terkait pandemi sudah kali dua untuk ketemu dengan para pandemi akan tetapi tidak mau.
- Terkait video yang viral para narkoba bukan di lapas salemba. Kami sudah memanggil ka pakarnya minta keterangan tersebut.
- Terkait ada pengendalian narkoba di lapas ada beberapa kendala dalam mengawasinya. Kakanwil baru saja menginjak kaki sudah ada yang memberi kode didalam.
- Perlu perbaikan sistem kepegawaian, tidak ada pegawai lapas yang ada pegawai kanwil sehingga setiap 6 bulan pegawai di pindahkan sehingga tidak sempat menciptakan Dinasti lapas.
- Hampir seluruh rutan dan lapas di kanwil DKI Jakarta mengalami over kapasitas.
- Saran kedepan dalam penetapan hukuman yang ringan perlu di kaji ulang seperti memperkerjakan sosial dan lain-lain

2. PERTEMUAN DENGAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PROV. DKI JAKARTA

Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta pada Kamis, tanggal 18 Februari 2021.

A. ANGGARAN

1. Penejelasan terkait dengan Pagu dan realisasi anggaran Tahun 2020 serta kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Kejaksaan di Provinsi DKI Jakarta. Anggaran Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri se-DKI Jakarta pada Tahun 2020 sebesar Rp.153.781.332.000,- dengan penyerapan mencapai 98,19 % atau sebesar Rp.150.996.366.963,-
2. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian Kinerja antara lain;
 - a) Berdasarkan Pagu Tahun 2020 sebagaimana tersebut diatas, terdapat ketidakseimbangan antara biaya penanganan perkara dan fakta perkara yang ditangani, misalnya Kejati OKI mendapatkan pagu

anggaran untuk 350 perkara namun pada kenyataannya perkara yang ditangani melebihi dari Pagu yang dianggarkan, begitu juga penanganan perkara tindak pidana khusus baik di Kejati maupun Kejari di wilayah OKI Jakarta; Pencapaian kinerja di bidang Intelijen sesuai dengan tupoksinya yaitu melakukan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan, terkait dinamika Sosial, Politik dan Keamanan di Propinsi OKI Jakarta, tentunya membutuhkan anggaran yang lebih dari daerah lainnya. Begitu pula dengan bidang Datun yang selama masa Pandemi *Covid-19* memiliki tugas untuk melakukan kegiatan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

- b) Terkait dengan kondisi Pandemi *Covid-19*, diperlukan anggaran untuk menunjang persidangan yang dilakukan secara *online* antara lain: Dalam melakukan Persidangan para Jaksa tidak ditunjang dengan sarana jaringan internet yang baik, minimnya media untuk melakukan persidangan *online* melalui zoom baik berupa komputer atau laptop, yang mengakibatkan sering terhambatnya persidangan
3. Terkait *over capacity* tahanan pada Rutan Polda, Polres, maupun Rutan/Lapas di wilayah Kejati DKI Jakarta menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian.
4. Keadaan gedung kantor yang tidak *representatif*, antara lain Kejari Jakarta Utara dan Kejari Jakarta Timur, serta tidak ada Rumah Dinas jabatan diseluruh Kejari.
5. Pagu anggaran tahun 2021 di Kejaksaan Tinggi OKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Se DKI Jakarta sebesar 158.185.947.000 terdiri dari 2 Program yakni program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp. 11.193.727.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 146.992.220.000

B. PENGAWASAN

1. Penanganan Perkara yang menonjol dan menarik perhatian masyarakat tahun 2020 dan awal tahun 2021 antara lain;
 - Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Perkara Korupsi di Asuransi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) ada 6 orang terdakwa yaitu Sdr. Syahmirwan, SE., Heru Hidayat, Dr. Hendrisman Rahim, Benny Tjokroputro, Joko Hartono Tirto, Dan Harry Prasetyo.
 - Perkara Korupsi Pemalsuan Surat Izin Keluar Indonesia jumlah terdakwa ada 5 orang yaitu ; saudari Dr. PINANGKI MALASARI, S.H.MH., ANDI

IRFAN JAVA, JOKO SOEGIARTO TJANDRA, Brigjen Pol PRASETIJO,
S.1.K, M.Si., Irjen Pol. Drs. NAPOLEON BONAPARTE, M.Si.

2. Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan yang disidangkan oleh Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yaitu Kejari Jakarta Selatan yaitu terdakwa Bilal Asif., Muhammad Asif Khan, Aris Sudirman, Iman Teguh Santoso, Maringan P. Siagian, Sudjianto Alias Yanto, Erska Karsia, Saul Pieter Jhon Leiwakabessy.Kejari Jakarta Timur yaitu Terdakwa Ihsan Haras, Wahyu Sidharta Dan David Zulvicar.
3. Terkait dengan penuntutan perkara Tindak Pidana Tindak Pidana Kepabeanan dan Tindak Pidana Cukai yang disidangkan oleh Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi OKI Jakarta. Dalam tahap eksekusi berhasil mengembalikan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.260.517.117.605,-.
4. Terkait Kegiatan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2020 – Januari 2021. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara telah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung kebijakan Pimpinan dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Pendampingan yang dilakukan oleh Datun pada Tahun 2020 sampai dengan 2021 antara lain adalah Pendampingan Pengadaan lahan untuk fasilitas pengelolaan sampah terpadu Pemprov DKI tahun 2020 di Bantargebang kota bekasi senilai Rp. 71.842.799.000,- dan dukungan Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp. 611.900.970.307,- sehingga total nilai Rp Total 683.143.769.307,- (enam ratus delapan puluh tiga miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh rupiah).
5. Pengamanan terhadap Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dalam percepatan penanganan *corona virus disease (covid-19)*;
 1. pada Dinas Kesehatan Provinsi OKI Jakarta Sebesar Rp. 958.237.339.146,-;
 2. Pengamanan Terhadap Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Pada Dinas Sosial Provinsi OKI Jakarta Sebesar Rp. 3.722.056.488.500,-;
 3. Pengamanan Terhadap Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi OKI Jakarta sebesar Rp. 5.521.444.220.129,-;

4. Pengamanan Pembangunan Strategis Nasional di 16 SKPD/BUMD/BLU pada Provinsi OKI Jakarta sebesar Rp 1.663.831.694.950,-
6. Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara Tindak Pidana Umum dan Pidana Khusus antara lain:
- Mengingat dalam penanganan perkara yang menarik perhatian masyarakat diperlukan kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaiannya, oleh karena itu dibutuhkan sarana berupa laptop untuk masing-masing jaksa, disertai jaringan internet dan alat perekam untuk mendukung keberhasilan persidangan tersebut.
 - Kejaksaan telah memiliki Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*, begitu juga Mahkamah Agung telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor.1691/DJU/SK/PS.OO/12/2020 ten tang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan *Restorative (Restorative Justice)* pada tanggal 22 Desember 2020. Untuk memperkuat landasan hukum penanganan perkara secara *Restoratif Justice* tersebut, agar dikuatkan dalam suatu Undang-undang, dan hal ini sudah termuat juga/diakomodir dalam RUU KU HAP atau RUU Kejaksaan
 - Dalam penguatan kewenangan Kejaksaan terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi, agar dimasukkan kewenangan bagi jaksa untuk melakukan Penyadapan sejak tahap Penyelidikan dalam RUU Kejaksaan.
7. Upaya dalam membangun Sinergitas, koordinasi, kerja sama yang terpadu dan harmonis dengan Penegak Hukum dan pihak terkait lainnya, Kejaksaan Tinggi OKI Jakarta sering melakukan dialog untuk pemecahan permasalahan penanganan perkara, antara lain :
- 1) Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jajaran aktif dalam pembahasan percepatan penanganan Covid-19 di wilayah OKI Jakarta bersama Stakeholder terkait.
 - 2) Kunjungan Wakajati ke Kepala Kantor Hukum dan HAM serta melakukan Koordinasi langsung dengan Kepala Rutan Cipinang untuk menyamakan visi dalam penanganan tahanan yang akan masuk ke LP/Rutan di wilayah OKI Jakarta. Hasilnya Kejaksaan berhasil memindahkan 100 (seratus) orang Tahanan di Rutan

Polda Metro Jaya ke Rutan Cipinang, sedangkan sisanya akan dilakukan secara bertahap;

- 3) Kunjungan Asisten Tindak Pidana Umum ke Polda Metrojaya dan BNN Propinsi OKI Jakarta dalam rangka koordinasi penanganan perkara, turut serta dalam kegiatan pemusnahan barang bukti;

Secara umum kerjasama dengan KPK tidak ditemukan kendala atau hambatan yang berarti, baik mengenai informasi data penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi maupun Supervisi Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Pendalaman/ Tanya Jawab:

- Bagaimana Kajati memenuhi kekurangan anggaran penanganan perkara? Bagaimana Indek perkaranya? Terkait Undang-undangan Kejaksaan sudah masuk proleknas. Peraturan Jaksa Agung tahun 2020, kelebihan kapasitas penjara bukan menjadi alasan. Apa menjadi dasar Kajati untuk melaksanakannya, menghentikan penuntutan karena restorasi justice? Kasus Habib Rizik dalam penerapan pasal, mohon penjelasan kejaksaan? Jika Restorasi diterapkan yang layak mendapat kasus ini.
- Terkait kewenangan penyadapan, apa konstruksi Kajati sehingga pasal penyadapan diterapkan?
- Terkait anggaran pengawasan apakah ada?, Hibah pemda DKI Jakarta membangun 15 lantai Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berapa nilainya?
- Terkait wilayah bebas korupsi patut di apresiasi, jangan sampai kasus korupsi internal tidak ditangani.
- Kasus Joko Chandra menyikapi perkembangan di persidangan lanjutkan.
- Apakah perilaku atau aturannya yang tidak pas.
- Apresiasi prestasi Kajari selama ini, masalah markus dilakukan pengusutan ulang. Terkait kasus video syur artis sejauhmana?
- Terkait Satgas di kejaksaan harus memerhatikan dari aspek investasi.
- Terkait Pagu Anggaran Kajati 2020-2021 kenaikan hanya sedikit sementara di Kejugung naik. Jangan sampai dalam menanganikan perkara dipersidangan kehabisan kuota. Terkait Kasus Pinangki sudah sejauh mana penanganannya?

Jawaban / Tanggapan:

- Terkait pidsus kajati hanya 1 kasus dan kajati 1 jadi se DKI dapat jatah 6kasus.
- Terkait dengan P15 dimasukan dalam uu bagaimana menciptakan situasi damai.

- Terkait HRS semula di di sidik oleh polda metro, kemudian Jaksa Agung meminta kajati yang menangani kasus tersebut. Terkait sedap disalahgunakan, dilakukan jika sudah menemukan indikasi.
- Terkait anggaran pendampingan dan pengaman tidak ada anggaran. Kajati mendampingi dana nilainya triliunan bekerjasama dengan gubernur DKI Jakarta dengan Mou Bersama. Mengenai hibah gedung dari 90 miliar untuk 15 lantai selanjutnya Gubernur menganggarkan kebutuhan lainnya.
- Terkait WBK dan WBM merupakan upaya kajati DKI Jakarta dengan catatan kalangan yang baik.
- Terkait sistem peradilan pidana mohon perhatian komisi III agar hukum agar hulu dan hilir seimbang.
- Terkait kasus HRS kami akan dalam lagi.
- Terkait Gisel tidak perlu dipublikasikan karena semuanya dimata hukum sama dan ditangani oleh perempuan juga.
- Terkait P19 kajati dan kepolisian sepakat dengan 1 kali walaupun terdapat kendala dilapangan dengan kesibukan masing-masing. Kecepatan menangani perkara sangat diupayakan.
- Terkait dengan P21 tidak dikabulkan memang ada tetapi jika ada akan kami tindaklanjuti hari ini.
- Ada satgas dari Jakasa Agung untuk mengawasi seluruh Kejaksaan di DKI Jakarta.
- Terkait kasus Pinanti sudah diponis 10 tahun, karena Pinanti banding maka kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sedang melakukan upaya hukum banding.

3. PERTEMUAN DENGAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA

Pertemuan dengan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya di pada Kamis, tanggal 19 Februari 2021.

A. ANGGARAN

1. Penjelasan terkait Pagu dan realisasi Anggaran tahun 2020 Polda Metro Jaya. Alokasi anggaran Polda Metro Jaya Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp, 3.468.087.193.000,- sampai dengan akhir Tahun Anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 3.381.259.662.000,- atau berkurang sebesar Rp. 86.827.531.000,- dengan realisasi sebesar 98,93 %. Penjelasan Per-Jenis Belanja adalah sebagai berikut :

- 1.1 Belanja Pegawai, Alokasi anggaran Belanja Pegawai Polda Metro Jaya Tahun Anggaran 2020 pada awal Tahun Anggaran berjumlah Rp. 2.306.202.589.000,- sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2020

berubah menjadi sebesar Rp. 2.259.240.569.000,- atau berkurang sebesar Rp. 46.962.020.000,- karena adanya revisi pengurangan Belanja Pegawai oleh Mabes Polri untuk menutupi kekurangan anggaran Belanja Pegawai Polda Lampung Tahun Anggaran 2020. Sampai akhir tahun anggaran penyerapan Belanja Pegawai mencapai sebesar Rp. 2.257.185.379.000,- sehingga dalam pelaksanaannya Belanja Pegawai Polda Metro Jaya tidak mengalami minus anggaran.

1.2 Belanja Barang. Alokasi anggaran Belanja Barang Polda pada awal Tahun Anggaran berjumlah Rp.1.075.770.520.000,- sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 berubah Rp. 1.035.056.695.000,- atau berkurang Rp.40.713.825.000,- atau (3,78%).

1.3 Belanja Modal. Alokasi anggaran Belanja Modal Polda Metro Jaya Tahun Anggaran 2020 pada awal Tahun Anggaran berjumlah Rp. 13.838.248.000,- sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 berubah menjadi sebesar Rp.86.962.398.000,- atau bertambah sebesar Rp.73.124.150.000,- (84,08)%.

2. Kendala dan Hambatan dengan adanya Refocusing anggaran beberapa program tidak bisa mencapai target kinerja antara lain; Pembangunan Polsek Tanjung Priok Polres Metro Jakarta Utara dibatalkan; Pembangunan Mako Polres Metro Tangerang Kota tidak tercapai 100% karena adanya pembatasan jumlah pekerja (efek PSBB); Program Quick Wins tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

3. Tidak adanya dukungan anggaran dari DIPA Satker Polda Metro Jaya dalam penanganan Covid-19 sehingga Polda Metro Jaya mengajukan anggaran ke :

- a. BNPB sebesar Rp. 6.090.000.000,-
- b. Hibah Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp.11.446.380.000.
- c. Mabes Polri sebesar Rp. 29.353.704.000.

4. Penjelasan terkait Pagu Definitif Polda Metro Jaya Tahun Anggaran 2021 Pagu awal sebesar Rp.3.635.690.029.000,- setelah Refocussing berubah menjadi Rp. 3.402.081.476.000,-

5. Terkait Anggaran Program Prioritas PMJ berjumlah Rp. 2.830.630.000,- sedang kebutuhan DUK GAR antara lain OPS. Aman Nusa II sebesar Rp.19.462.7782.000,- dan Operasional Program Kampung Tangguh Jaya sebesar Rp. 17.900.000.000,-

6. PENGAWASAN

1. Penjelasan terkait dengan kasus-kasus yang menonjol di Polda Metro Jaya pada Tahun 2002. Jumlah Crime Clearance sebanyak 34.239 kasus, antara

lain sebagai berikut; Kasus unjuk rasa anarkis menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja; Kasus Pembegalan terhadap pesepeda; Kasus narkoba yang melibatkan jaringan nasional dan Internasional; Kasus Kerumunan massal yang melanggar protocol kesehatan Covid-19 melibatkan MRS; Kasus penyerangan 6 anggota Laskar Khusus FPI kepada personel PMJ yang sedang bertugas; dan Kasus kejahatan Siber.

2. Penjelasan terkait Satgas Pandemi Covid-19. Polda Metro Jaya beserta Jajaran melaksanakan kegiatan rutin, operasi atau satuan tugas khusus selama masa pandemi Covid-19 yaitu Operasi Kepolisian Aman Nusa II yang merupakan Operasi kepolisian dalam penanganan pandemi Covid-19. Operasi ini telah berlangsung mulai dari Tahap I hingga Tahap VII sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini. Terdapat 6 Satgas yang mendukung pelaksanaan operasi yaitu: Satgas 1 Deteksi, Satgas 2 Pencegahan, Satgas 3 Penanganan, Satgas 4 Rehabilitasi, Satgas 5 Penegakan Hukum dan Satgas 6 Bantuan Operasi. Jumlah personel Polda Metro Jaya yang terlibat dalam operasi sebanyak 1.297 personel.
3. Polda Metro Jaya melakukan beberapa upaya dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol Kesehatan antara lain;
 - 3.1 Operasi Yustisi yang merupakan Operasi Gabungan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan jumlah personel sebanyak 6.800 personel.
 - 3.2 Timsus Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 merupakan timsus gabungan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Satpol PP, dan Dishub dengan jumlah personel sebanyak 3.855 personel yang memiliki tugas .menegakkan aturan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak) serta melakukan penegakan disiplin pelanggaran protokol Kesehatan. Adapun akumulasi hasil pelaksanaan Timsus Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 sejak 21 September 2021 hingga saat ini adalah Teguran lisan maupun tulisan sebanyak 460.761 kali; Pembubaran kerumunan sebanyak 25.638 kali; Pembagian masker sebanyak 2.682.057 masker.
 - 3.3 Kampung Tangguh Jaya merupakan proyek kolaboratif (Pemerintah dan elemen masyarakat) yang menitikberatkan pada partisipasi masyarakat berbasis komunitas untuk mengubah perilaku masyarakat agar disiplin dan terbiasa dengan perilaku hidup bersih dan sehat melalui penerapan 3T dan 3M guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Adapun

jumlah Kampung Tangguh Jaya yang dibangun hingga saat ini sebanyak 839 buah di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya.

3.4 Gerakan Jakarta Bermasker yang bertujuan mengajak seluruh masyarakat untuk sadar dan proaktif dalam penggunaan masker dalam rangka pencegahan penularan Covid-19. Sasaran gerakan Jakarta Bermasker ini yaitu lokasi-lokasi keramaian disertai pembagian masker dengan merangkul komunitas terkecil yang ada di tengah-tengah masyarakat. Adapun jumlah masker yang telah dibagikan sejak 1-18 Februari 2021 sebanyak 2.105.613 buah.

3.5 Kesiapan Polda Metro Jaya untuk mengawal keberhasilan rencana program vaksinasi nasional adalah sebagai berikut;

- 1) Mengerahkan 1.161 personel untuk melakukan pengawalan dan penjagaan proses distribusi vaksin.
 - 2) Menyiagakan 72 personel tenaga Kesehatan yang telah dilatih untuk menjadi vaksinator,
 - 3) Menyiapkan 908 personel Bhabinkamtibmas untuk bertindak sebagai tracer sebagai Langkah deteksi dini dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19, bersinergi dengan Babinsa dan Dinas Kesehatan setempat.
4. Strategi yang diterapkan dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya yaitu melalui prinsip pemolisian :
- 4.1. Mengedepankan preventive strike, bukan hanya sekedar menghimbau tetapi juga disertai dengan tindakan pemolisian yang nyata yang memunculkan efek penggentarjeraan.
 - 4.2. Berkolaborasi dengan para stakeholder dan para pemangku kebijakan.
 - 4.3. Membuka kesempatan bagi partisipasi publik, khususnya dalam upaya pencegahan kejahatan.
 - 4.4. Penegakan hukum yang tegas dan memperoleh dukungan legitimasi dari masyarakat.
 - 4.5. Manajemen media.
5. Terkait dengan kegiatan pemolisian antara lain :
- 5.1. Membangun Kampung Tangguh Jaya dengan Bhabinkamtibmas sebagai backbone kegiatan.
 - 5.2. Membentuk Satuan Tugas, mengumpulkan Sumber Daya Organisasi terbaik untuk melaksanakan tugas-tugas dengan atensi khusus.
 - Tim Perumus Kampung Tangguh Jaya.

- Timsus Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19.

5.3 Penegakan Hukum yang tegas terhadap pelanggar protokol Kesehatan sebagai berikut ; Memperkuat soliditas dan sinergitas TNI-Polri; Meningkatkan jumlah pengungkapan dan penyelesaian kasus, zero tolerance, khususnya kasus yang menjadi perhatian publik dan meresahkan masyarakat; Penegakan hukum yang tegas terhadap perilaku yang bermuatan provokasi, intoleransi, anarkhi, dan radikalisme; dan Keterbukaan informasi kepada media, sebagai suatu bentuk akuntabilitas dari upaya pemolisian yang telah dilakukan.

6. Fokus utama Polda Metro Jaya saat ini adalah penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Program Kampung Tangguh Jaya yang telah dicanangkan memiliki beberapa komponen diantaranya:

- Tangguh Kesehatan melalui pelaksanaan 3T (Testing, Tracing & Treatment) serta 3M (Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan)
- Tangguh Ketahanan Pangan melalui pemenuhan kebutuhan primer masyarakat terdampak Covid-19 dalam aspek kesejahteraan/pangan misalnya budidaya ikan lele dan nila, budidaya tanaman hidroponik, Dapur Umum serta Empathy Building.
- Tangguh Keamanan yang bertujuan menjaga stabilitas keamanan serta mengantisipasi gangguan ketertiban masyarakat misalnya melalui kegiatan siskamling, one gate system, deteksi dini, moderasi dan literasi, restorative justice, RW bebas Narkoba, dan kegiatan lainnya.
- Pengembangan komponen lainnya sesuai kebutuhan dan potensi lingkungan.

Pendalaman/ Tanya Jawab:

- Terkait Ide Kapores Jakarta Pusat Kombes Hengki Hariadi dalam menyelesaikan Virus Covid 19, sebagai pidato Presiden jangan keluar sangat, sangat, sangat tidak perlu. Genus buatan UGM untuk memberantas Virus Corona, jika bisa difasilitasi sampai kelurahan. Kekuatan Kapolri ada di Bhabinkhatibmas ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Serta kepada Kapolda terkait dengan Narkoba perlu tidak di Polri?
- DKI Jakarta dianggap sebagai etalase penegakan hukum dan Ham Nasional di Indonesia. Kasus yang susah dilupakan Kasus Penembakan KM.50, manusia tidak boleh dibunuh dengan keji, masa PMJ tidak bisa melumpuhkan 6 orang tersebut? Mohon Pak Kapolda dijelaskan terkait kasus tersebut? Kapolri akan

menindaklanjuti temuan Komnas Ham dan Kapolda yang mendahului demi hukum.

- Terkait dengan Mafia Tanah, banyak oknum anggota polisi hanba cukong-cukong. Nanti masyarakat membela hak mereka dituduh radikalisme. Hukum tegakkanlah hukum secara adil, ada tetangga sebelah buka sampai pagi, yang teman saya dikawal polisi supaya ditutup.
- BNNP tidak ada dijelaskan penindakannya hanya penindakannya saja, kemudian terkait dengan Narkoba dari Lapas, petugas masuk kedalam selalu dihalang-halangi. Kemudian Polda Metro Jaya masih banyak kasus-kasus pesanan.
- Terkait narkoba, Direktur bidang Narkoba dengan BNNP tidak ada data yang terukur, seperti mana wilayah penanganan yang dilakukan BNNP dan Dir Narkoba. Baik dari aspek penindakkan dan penanganan Narkoba di DKI.
- Kedepan Pemetaan sumber Narkoba dari mana?
- Paparan Kapolda masih Prometer bukan Presisi, peran bhimasnya, civilian harus dimunculkan.
- Presisi yang di paparkan Kapolri pada saat Fit n Propertest, dan di panggil dengan Pimpinan Komisi III dan Baggar untuk melancarkan kegiatan Polri.
- Apa saja yang dilakukan kapolda dalam menghadapi oknum-oknum nakal di DKI Jakarta.
- BNNP DKI Jakarta hanya diberikan 12 Miliar, ada 6 jaringan dalam pemberantasan narkoba. BNNP kedepan mau diapakan?

Jawaban/ Tanggapan :

- Terkait dengan persoalan kasua tewasnya 6 orang FPI di Rest Area Tol yang selama ini berita-berita yang tidak teruji jika ada bukti yang teruji ayo kita buktikan bersama-sama. Tindakan melawan hukum antara kelompok hercules dengan kelompok FPI sama-sama di dalam hukum. Kami akan siap menjelaskan kasus ini didalam rapat tertutup bukan di media.
- Benny Kabur Harman dari Fraksi Partai Demokrat mengusulkan adakan rapat tertutup khusus terkait dengan kasus KM.50 yang sebelumnya di sepakati ditingkat pimpinan.
- Pimpinan Tim menyampaikan menyampaikan ditingkat pimpinan untuk membicarakan hal ini karena Kepolisian ada mitra Komisi III yang terpenting negara kita aman dan kondusif.
- Polda Metro membuat program Kampung Narkoba untuk dibina masyarakatnya dengan Kampung Tanguh.

4. PERTEMUAN DENGAN KEPALA BNN PROVINSI DKI JAKARTA

Pertemuan dengan Kepala BNNP DKI Jakarta pada Kamis, tanggal 19 Feb 2021.

B. ANGGARAN

1. Penjelasan terkait dengan Pagu Tahun TA. 2020 sebesar Rp. 12.150.005.000,- Realisasi Anggaran sebesar Rp. 11.455.085.058,- (94,28%)
2. Kendala dan hambatan yang dihadapi antara lain;
 - Pelaksanaan kegiatan luar kantor dalam bentuk tatap muka banyak berkurang karena pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PSBB, digantikan dengan kegiatan dalam kantor secara virtual melalui aplikasi online seperti ZOOM dan WEBEX.
 - Dukungan anggaran yang masih kecil dan terbatas untuk pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN).
 - Kurangnya Sikronisasi kegiatan P4GN oleh beberapa Penggiat Anti Narkoba dan Satgas Anti Narkoba.
 - Kurangnya konsistensi dan kemandirian kelompok masyarakat dalam mengembangkan wirausahanya.
 - Belum ada program pendampingan dari pemerintah daerah bagi kelompok masyarakat di kawasan rawan (pemasaran dan modal).
7. Realisasi Anggaran BNNP DKI Jakarta TA. 2020 berjumlah sebesar Rp2.150.005.000,-
8. Terkait dengan Pagu Definitif TA. 2021 setelah Refocusing sebesar Rp. 12.115.815.000,- dengan Program Prioritas BNNP DKI Jakarta sebagai berikut;
 - Terbentuknya Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di Kelurahan Lubang Buaya, Kelurahan Manggarai dan Kelurahan Ancol.
 - Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan.
 - Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).
 - Pelatihan bagi Petugas Rehabilitasi Instansi Pemerintah dan Komponen Masyarakat.
 - Monitoring dan Evaluasi Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah dan Komponen Masyarakat.
 - Uji Kompetensi Konselor Adiksi.

3. PENGAWASAN

1. BNNP DKI Jakarta jumlah kasus Januari – Desember tahun 2020 sebanyak jumlah tersangka 20 orang tersangka, 14 kasus telah P21 dan 4 kasus dalam

proses penyidikan. Jumlah kasus sebanyak 18 kasus dengan BB Narkoti sebanyak Shabu 3.824,45 gram, Ektasi sebanyak 274 Butir, Heroin sebanyak 69,53 gram, Serbuk bibit tembakau sintetis sebanyak 61,40 gram, Tembakau Gorilla sebanyak 34,96 gram dan Ganja sebanyak 115.002,58 gram. Sedangkan Barang Bukti Non Narkotika HP sebanyak 23 buah, ATM satu buah, Mobil satu unit, Motor tiga unit dan Bajaj satu unit.

2. Penjelsana terkait Bidang Penindakan BNNP DKI Jakarta pada tahun 2021 berjumlah 7 kasus dalam tahap penyidikan, jumlah tersangka 9 orang, Barang Bukti Narkotika Shabu sebanyak 6.762,58 Gram, Ganja sebanyak 1.204,41 Gram, dan Ekstrak Ganja Cair sebanyak 143 Gram. Sedang Barang Bukti Non Narkotika HP 12 buah dan motor satu unit.
3. Penejelasan terkait Bidang Rehabilitas BNNP DKI Jakarta pada tahun 2021, Pelaksanaan program rehabilitasi di Lapas dan Rutan yang dilaksanakan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta bekerjasama dengan BNNP DKI Jakarta. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mendapatkan program Rehabilitasi baik medis maupun sosial juga terus meningkat.
4. Pada Tahun 2020 tercatat ada 3 Lapas yang telah menyelenggarakan program Rehabilitasi yaitu Lapas Kelas IIA Narkotika 1.400 orang, Lapas Salemba 160 orang dan Lapas Pondok Bambu 150 orang sehingga total 1.710 orang. Sedangkan untuk Tahun 2021 yaitu Lapas Kelas IIA Narkotika 1.100 orang, Lapas Kelas 1 Cipinang 744 orang, Lapas Pondok Bambu 70 orang, Rutan Kelas 1 Cipinang 500 orang dan Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat 500 orang sehingga total 2.914 orang.
5. Upaya yang telah dilakukan oleh BNNP DKI Jakarta beserta jajaran untuk mendorong efektifitas program Rehabilitasi adalah ikut membantu dalam proses Rehabilitasi yaitu pelaksanaan asesmen awal, asesmen akhir, serta memberikan pelatihan bagi petugas rehabilitasi di Lapas/Rutan.
6. Program P4GN dalam upaya pemetaan jaringan dalam upaya Penindakan TP Narkotika, BNNP DKI Jakarta telah melakukan kerjasama dengan berbagai Aparat Penegak Hukum salah satunya dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu dengan melakukan pemantauan terhadap barang-barang yang masuk dari Luar Negeri yang diduga berisi Narkoba.
7. Terkait Sinergitas dan Kerjasama BNNP DKI Jakarta sudah melakukan *Coffee Morning* dengan Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta terkait dengan optimalisasi pelaksanaan kegiatan *Assesment* Terpadu (TAT) bagi para pengguna narkoba dan optimalisasi Acara Pemeriksaan Singkat

(APS) untuk penanganan kasus TP Narkotika. Selain dengan APH BNNP DKI Jakarta juga telah melakukan kerjasama dengan Jasa pengiriman Ekspedisi seperti JNE, PT. POS INDONESIA, TIKI, DHL, GRAB, GOJEK, PAHALA KENCANA, TIKI dll untuk melakukan pemantauan terhadap paket yang diduga berisi Narkoba.

5. PERTEMUAN DENGAN KETUA PENGADILAN TINGGI, KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA, KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA, DAN KEPALA PENGADILAN TINGGI MILITER UTAMA PROVINSI DKI JAKARTA

Pertemuan pada Kamis, tanggal 19 Februari 2021 yang bertempat di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

1. PENGADILAN TINGGI PROVINSI DKI JAKARTA

A. ANGGARAN

1. Penjelasan terkait Pagu Dan Realisasi Anggaran Tahun 2020. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2020 menerima Pagu Definitif dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (DIPA 01) sebesar Rp. 42.310.341.000 dan Badan Peradilan Umum (DIPA 03) sebesar Rp. 605.310.000. Untuk Belanja Operasional Sebesar Rp. 5.584.700.000,- Untuk Belanja Modal Sebesar Rp. 295.000.000,- Untuk Perkara Pidana Sebesar Rp. 421.160.000,- Untuk Perkara Tipikor sebesar Rp. 108.000.000,-
2. Kendala-Kendala yang dihadapi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk Belanja Non Operasional. Banyaknya anggaran Bimtek yang di tarik ke pusat dikarenakan adanya pemotongan anggaran untuk eselonl.
 - 2) Untuk Belanja Pegawai. Sehubungan dengan adanya gaji ke 13 yang sudah dianggarkan pada tahun sebelumnya tidak bisa direalisasikan di karenakan adanya instruksi dari Menpan untuk gaji 13 dan remonerasi 13 tidak dibayarkan.
 - 3) Untuk Belanja Non Operasional. Banyak anggaran jenis belanja yang tidak sesuai dengan SBU (Standar Biaya Umum) dikarenakan minimnya anggaran yang didapatkan seperti Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Perawatan Rumah Dinas, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran.
 - 4) Untuk Belanja Modal. Ada beberapa jenis belanja modal yang belum dapat dilaksanakan seperti renovasi gedung dikarenakan keterbatasan anggaran dari pusat sedangkan gedung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada gedung depan sudah tua dan atapnya sudah lapuk. Dan ada

beberapa jenis belanja pengadaan yang tidak dapat dimasukkan dikarenakan terbatasnya anggaran.

3. Pagu Dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 Pengadilan Negeri Se – DKI Jakarta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membawahi 5 (lima) Satker Pengadilan Negeri yang pada tahun 2020 menerima Pagu Definitif dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Umum dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pagu sebesar Rp.37.752.023.000,- Realisasi Rp.36.960.998.362,- Sisa Rp.791.024.638,-
2. Pengadilan Negeri Jakarta Utara Pagu sebesar Rp.20.142.399.000,- Realisasi Rp.20.047.945.534,- Sisa Rp.118.881.770,-
3. Pengadilan Negeri Jakarta Barat Pagu Rp. 25.048.578.000,- Sisa sebesar Rp.151.367.233,-
4. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pagu Rp.20.048.576.000,- Realisasi sebesar Rp. 20.029.984.002,- Sisa sebesar RP. 18.591.998
5. Pengadilan Negeri Jakarta Timur Pagu Rp.19.687.839.000,- Realisasi sebesar Rp.19.469.901.004,- Sisa sebesar Rp. 217.937.996,-

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

No.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA
1	Pos Bantuan Hukum	72.000.000	70.800.000	1.200.000
2	Perkara Pidana	608.999.000	597.618.800	11.380.200
3	Perkara Pidana Korupsi	189.025.000	182.810.000	6.215.000
4	Perkara PHI	393.134.000	380.068.000	13.086.000
5	Pembebasan Biaya Perkara	4.600.000	-	4.600.000
	Jumlah	1.267.758.000	1.231.296.800	36.461.200

2. Pengadilan Negeri Jakarta Utara

No.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA
1	Pos Bantuan Hukum	72.000.000	71.100.000	900.000
2	Perkara Pidana	841.452.000	841.148.999	303.001
3	Pembebasan Biaya Perkara	4.600.000	4.500.000	100.000
4	Perkara Perikanan	12.560.000	12.500.000	60.000
	Jumlah	930.612.000	929.308.999	1.303.001

3. Pengadilan Negeri Jakarta Barat

No.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA
1	Pos Bantuan Hukum	72.00.000	72.000.000	-
2	Perkara Pidana	687.000.000	685.807.305	1.192.695
3	Pembebasan Biaya Perkara	1.840.000	290.000	1.550.000
	Jumlah	760.840.000	758.097.305	2.742.695

4. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

No.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA
1	Pos Bantuan Hukum	72.000.000	72.000.000	-
2	Perkara Pidana	793.650.000	793.467.725	182.275
	Jumlah	865.650.000	865.467.725	182.275

5. Pengadilan Negeri Jakarta Timur

No.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA
1	Pos Bantuan Hukum	72.000.000	66.000.000	6.000.000
2	Perkara Pidana	593.700.000	521.173.500	31.976.500
	Jumlah	625.150.000	587.173.500	37.976.500

4. Penjelasan terkait Pagu Definitif Tahun 2021 Pagu Definitif Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Belanja Non Operasional Perkantoran Sebesar Rp. 134.178.000,- Belanja Gaji dan Tunjangan Sebesar Rp. 39.069.387.000,- Belanja Operasional Sebesar Rp.6.115.538.000,- dan Belanja Modal Sebesar Rp.98.400.000,-
5. Program Prioritas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk tahun 2021 mempunyai program prioritas untuk belanja modal pada Pengadaan Alat Pengolah Data berupa Laptop untuk SIPP terutama Panitera Pengganti. Pada tahun 2018 sudah diadakan program prioritas untuk pengadaan alat pengolah data berupa laptop untuk Hakim sebanyak 36 buah.
6. Kebutuhan Dukungan Anggaran. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk tahun 2020 memerlukan anggaran yang sangat mendesak terutama untuk Belanja modal seperti Renovasi Gedung Kantor dikarenakan Gedung pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah tua dan banyak mengalami kerusakan; Untuk Belanja Operasional Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memerlukan anggaran tambahan untuk Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Perawatan Rumah Dinas, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ,Belanja Keperluan Sehari – hari Perkantoran; Untuk Belanja Non Operasional Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memerlukan anggaran untuk Bimbingan Teknis seperti Bimbingan teknis untuk Kepaniteraan yang berupa Bimbingan Teknis Hakim, Bimbingan Teknis Panitera Pengganti, Bimbingan Teknis Juru Sita / Juru sita Pengganti. Sedangkan untuk Bimbingan Non Teknis yang berupa Bimbingan Teknis Perencanaan, Bimbingan Teknis Monitoring Evaluasi/Laporan Kegiatan, Bimbingan Teknis Kepegawaian/IT.

B. PENGAWASAN

1. Data Perkara pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri se DKI. Pada tahun 2020 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima dan memutus perkara dengan data sebagai berikut :

NO	PERKARA	SISA BULAN LALU	MASUK	JUMLAH	PUTUS	SISA AKHIR
1	PERDATA	125	748	873	726	147
2	PIDANA	55	512	567	524	43
3	PIDANA ANAK	0	12	12	12	0
4	TIPIKOR	-	49	49	45	4

- Pada tahun 2020 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam melaksanakan kewenangan menerima, memeriksa mengadili perkara (upaya hukum) Perdata, Pidana, Pidana Anak dan Perkara Tipikor dengan ratio penyelesaian sebesar : 91,84%
- Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri se Wilayah DKI Jakarta selama tahun 2020 dalam melaksanakan kewenangan menerima, memeriksa mengadili perkara Gugatan, Permohonan, Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Pengadilan Hubungan Industrial, Pidana Biasa, Pidana Singkat, Pidana Lalu Lintas (Tilang), Pidana Ringan, Pidana Praperadilan, Pidana Anak, dan Pidana Tipikor dengan ratio penyelesaian sebesar : 83,17%
- Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus pada Tingkat Kasasi sampai dengan Bulan Desember 2020 sebagai berikut :

No.	PERKARA	SISA	MASUK	JML	CABUT / TMS	PUTUS	SISA
1.	GUGATAN/ BANTAHAN/ PERLAWANAN	23	133	156	-	91	65
2.	PERMOHONAN	-	3	3	-	-	3
3.	PIDANA UMUM	9	85	94	7	43	44
4.	PIDANA ANAK	-	3	3	-	1	2
5.	PIDANA KHUSUS TPKOR	14	-	40	-	13	41
6.	KEPAILITAN	8	63	71	-	56	15
7.	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	14	37	51	-	45	5
8.	PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI)	53	179	232	-	87	145

- Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus pada Tingkat Kasasi sampai dengan Bulan Desember 2020 sebagai berikut :

NO.	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	DIKIRIM	TMS	PUTUSAN DITERIMA	SISA
1	Januari	5	9	7	0	2	7
2	Februari	7	9	7	2	2	7
3	Maret	7	2	7	0	0	2
4	April	2	6	5	0	0	3
5	Mei	3	3	6	0	0	0
6	Juni	0	14	8	0	0	6
7	Juli	6	10	10	0	0	6
8	Agustus	6	9	4	0	0	11
9	September	11	6	11	0	0	6
10	Oktober	6	1	6	0	0	1
11	Nopember	1	2	1	0	0	2
12	Desember	2	6	0	0	0	8
	Jumlah		77	72		4	

8. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas I A Khusus pada Tingkat Kasasi sampai dengan Bulan Desember 2020 sebagai berikut

No.	PERKARA	JUMLAH
1	Perdata	88
2	Pidana	69
3	Pidana Anak	1

9. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A Khusus pada Tingkat Kasasi sampai dengan Bulan Desember 2020 sebagai berikut

NO	PERKARA	JUMLAH
1	Perdata	65
2	Pidana Biasa	117
3	Pidana Anak	1
4	Pidana Perikanan	0

10. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus pada Tingkat Kasasi sampai dengan Bulan Desember 2020 sebagai berikut

NO	PERKARA	JUMLAH
1	Perdata	48
2	Pengadilan Hubungan Industrial	0
3	Pidana Biasa	34
4	Pidana Anak	0
5	Pidana Tipikor	0
6	Pidana Perikanan	0

11. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus pada Tingkat Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara Gugatan/Bantahan Perlawanan, Pidana Umum, Pidana Anak, Pidana Khusus Tipikor, Kepailitan, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan Perselisihan Industrial (PHI) dengan ratio penyelesaian sebesar 46,04%.

12. Jumlah Sisa Perkara yang diputus merupakan sisa perkara yang belum terselesaikan pada tahun 2019 dan kemudian diputus / diselesaikan di tahun 2020.

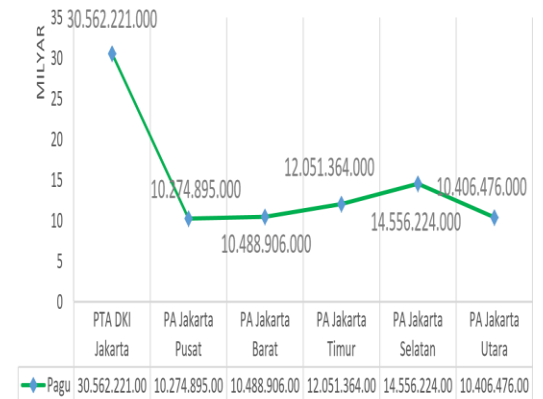
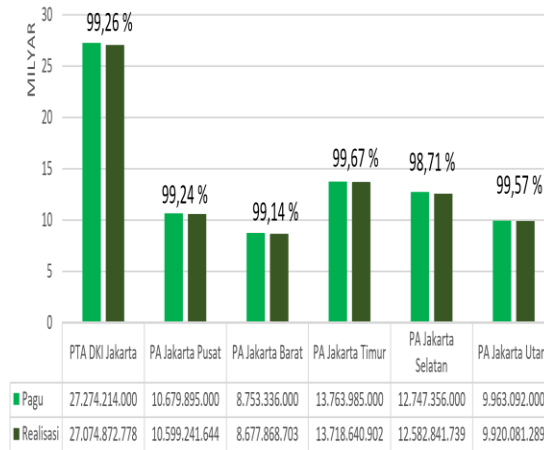
13. Upaya Penerapan Reformasi Birokrasi, Profesionalisme, dan Integritas pada Pengadilan Tinggi dan 5 Pengadilan Negeri dibawahnya. Untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi tersebut Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan 5 (lima) Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah dan sedang melaksanakan reformasi birokrasi melalui kegiatan utama yaitu Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan Pembangunan Zona Integritas (ZI).

14. Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se – DKI Jakarta telah dimulai sejak tahun 2018 yang diawali dengan melakukan sosialisasi, penancangan pembangunan zona integritas, Pembentukan Tim Kerja, penyusunan rencana kerja dan rencana aksi, monitoring dan evaluasi (moneyv). Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2018 telah memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan pada tahun 2021 ini telah mengajukan usul penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sedangkan 3 (tiga) Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah melalui evaluasi yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta diusulkan untuk mengikuti penilaian Pembangunan zona integritas pada tahun 2021 untuk memperoleh WBK.
15. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme hakim dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu memeriksa dan memutus perkara merupakan suatu kebutuhan yang mutlak diperlukan karena dengan hakim yang profesional dan berintegritas, keadilan melalui putusannya dapat diwujudkan. Untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme dan integritas hakim baik pada Pengadilan Tinggi maupun pada Pengadilan Negeri , telah dilakukan upaya diantaranya :
- Menugaskan hakim untuk mengikuti pelatihan
 - Melaksanakan sosialisasi PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Pengadilan Elektronik serta petunjuk teknis pelaksanaannya
 - Melaksanakan kunjungan kerja pembinaan pada 5 (lima) pengadilan di wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
 - Mengikuti Workshop, FGD, pembinaan, diskusi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan peningkatan profesionalisme dan integritas.
16. Upaya yang dilakukan dalam rangka memenuhi protokol kesehatan melalui penyelenggaraan sidang online maupun e-court. Pelaksanaan sidang secara online dan e-court. Sebelum merebaknya virus Corona Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia telah melaksanakan sidang elektronik perkara perdata dengan landasan hukum PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

2. PENGADILAN TINGGI AGAMA

A. ANGGARAN

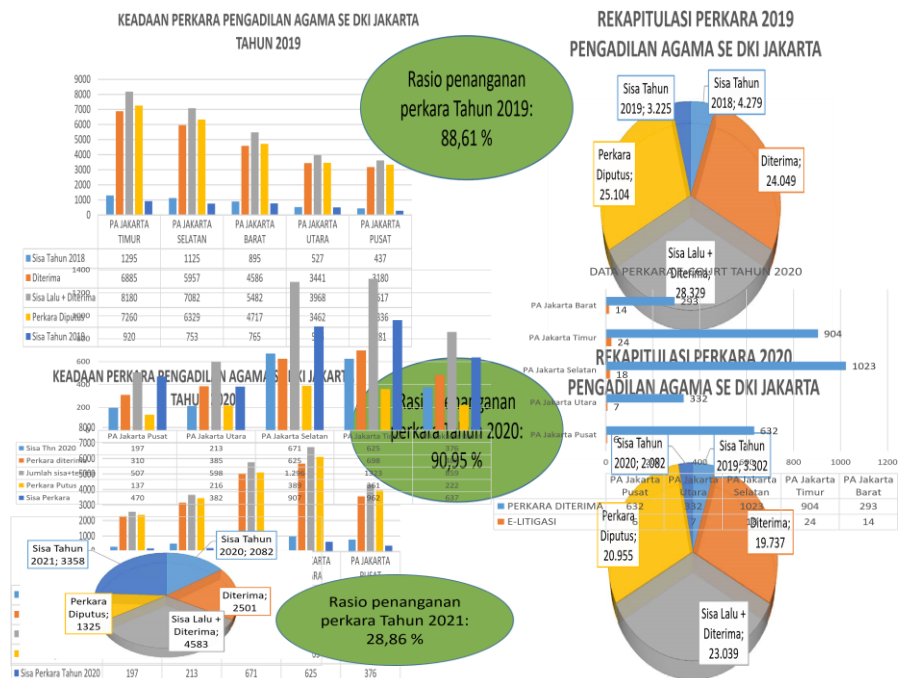
1. Pagu anggaran Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp.27.274.214.000,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.074.872.778,- atau 99,26%. Sebagaimana tabel dibawah ini.
2. Pagu anggaran badan urusan administrasi MA RI dan Dirjen Badilag MA RI



3.

B. PENGAWASAN

1. Keadaan dan rekapitulasi perkara Pengadilan agama Se DKI Jakarta tahun 2019 dan 2020 sebagaimana table grafik dibawah ini;



2. Keadaan dan Rekapitulasi Perkara Pengadilan Agama Se-DKI Jakarta pada Tahun 2020 yaitu sisa perkara sebanyak nihil, perkara putus sebanyak 54 perkara, perkara diterima sebanyak 153 perkara, sisa perkara tahun 2019 1 perkara, atau 100%.
3. Keadaan dan Rekapitulasi Pengadilan Tinggi Agama pada Tahun 2021 Bulan Januari Tahun 2021 yaitu sisa perkara sebanyak 13, perkara putus 33, perkara diterima 46, sisa tahun 2020 13 perkara, atau 94,54%.
4. Kendala-kendala yang di hadapi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta adalah sebagai berikut;
 - o Belum mempunyai Gedung sendiri.

- o Status masih pinjam pakai Gedung milik milik Pemda Provinsi DKI Jakarta (perjanjian terbaru tahun 2017 selama 5 tahun)
 - o Sarpras didalamnya milik Pemda dan telah berumur tua (pengadaan sebelum tahun 2000)
 - o Belum memenuhi kebutuhan ruangan lainnya
 - o Kurang mendukung kebutuhan ruangan dengan jumlah pegawai 72 orang.
5. Sedangkan Pengadilan Agama Jakarta Timur bangunan Gedung kurang memadai karena tertutup bangunan lainnya dan belum memenuhi kebutuhan ruangan dengan jumlah pegawai 63 orang.

3. PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

A. ANGGARAN

1. Penjelasan terkait Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai 2 (Dua) Pagu Anggaran yang berasal dari Eselon I Badan Urusan Administrasi (BUA) dan DIPA yang berasal dari Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Masing masing DIPA memperoleh Anggaran Sebesar Rp. 14.224.250.000,- Dengan Realisasi Sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
1.	2	3	4	5
A.	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI			
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN)	0	1,232.358	0
	2. HIBAH	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	1,232.358	0
B.	BELANJA			
	1. Belanja Pegawai	11.313.268.000	11.295.451.047	99,84 %
	2. BelanjaBarang	2.885.982.000	2.709.083.273	93,87 %
	3. Belanja Modal	25.000.000	24.992.000	99,97 %

1. Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 288.647.000,-Dengan Realisasi Sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
1.	2.	3.	4	5
A.	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI			
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN)	0	271,993,912	0
	2. HIBAH	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	0	0
B.	BELANJA			
	1. Belanja Pegawai	0	0	0
	2. BelanjaBarang	288.647.000	271.993.912	94,23 %
	3. Belanja Modal	0	0	0

2. Adapun Hambatan atau Kendala – Kendala yang dihadapi antara lain:
 - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai kawal depan perlu bebenah diri untuk menjadi peradilan yang Modern hal tersebut perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
 - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta saat ini telah menyelesaikan Pembangunan Gedung Kantor yang sudah 100% pelaksanaan berakhir pada tanggal 05 Desember 2014, yang semula tidak memadai saat ini menjadi 4 (empat) lantai permasalahan yang dihadapi dengan kondisi tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Saat ini untuk Pemeliharaan Gedung kantor dengan kondisi 4(empat) lantai masih dirasakan belum memadai Pagu untuk pemeliharaan setiap tahun hanya sebesar Rp. 112.500.000,-
3. Pagu Difinitif Anggaran Tahun 2021 dan Program – Program Prioritas Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 15.858.260.000,- sedangkan Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp 315.720.000,- Program – program prioritas yang akan dilaksanakan dengan dukungan anggaran dalam rangka optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT).

2. PENGAWASAN

1. Terkait Penyelesaian Perkara PT.TUN.Jakarta dan PTUN Sewilayah Hukum PT.TUN.Jakarta Tahun 2020 adalah Sisa awal 30 perkara, masuk 339 perkara, Putus 307 perkara.
2. Rekapitulasi amar putusan perkara banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bulan Januari S/D Desember 2020;

No	Wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	Kategori Putusan					Jumlah
		Kuat	Kuat (Perbaikan)	Batal	Cabut	N. O	
1.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	195	1	107	2	2	307
T o t a l		195	1	107	2	2	307

3. Rekapitulasi jenis perkara banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bulan: januari s/d desember 2020.

No	Jenis Perkara	Jumlah	Ket
1	Pertanahan	127	
2	Kepegawaian	89	
3	Perizinan	29	
4	Lingkungan Hidup	2	

5	Tender/PengadaanBarangdanJasa / Lelang	6	
6	BadanHukum / Parpol	11	
7	KepalaDesadanPerangkatDesa	0	
8	Kepala Daerah	0	
9	Proses PemilihanUmum	0	
10	PergantianAntarWaktu	0	
11	Ketenagakerjaan	3	
12	SengketaInformasiPublik / KIP	0	
13	Pengadaan Tanah / Perumahan	0	
14	FiktifPositif	0	
15	PenyalahgunaanWewenang	0	
16	TindakanAdministrasiPemerintahan	0	
17	Merk / Haki	0	
18	Lain – Lain	102	
J U M L A H		369	

4. Terkait Perkara Tahun 2021 Kinerja Penyelesaian Keadaan Perkara PT.Tun.Jakarta dan PTUN Sewilayah Hukum PT.TUN Jakarta Periode : Januari S/ D Februari Tahun 2021 yaitu sisa awal 62 perkara, perkara masuk 32 perkara, Perkara putus 57 perkara.
5. Rekapitulasi perkara diputus pada pengadilan tun sewilayah pt.tun.jakarta periode : januari s/ d februari tahun 2021 yaitu Sisa awal 62 perkara, Perkara Masuk 32 perkara, Perkara Putus 57 perkara, dan Sisa Akhir 37 perkara.
6. Terkait rekapitulasi amar putusan perkara banding pada pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta bulan : januari s/d februari 2021

No	Wilayah PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta	KategoriPutusan					Jumlah
		Kuat	Kuat (Perbaikan)	Bata l	Cabut	N.O	
1.	PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta	36	0	21	0	2	57
Total		36	0	21	0	2	57

7. Rekapitulasi jenis perkara banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bulan :Januari s/d Februari 2021

No	JenisPerkara	Jumlah	Ket
1	Pertanian	16	
2	Kepegawaian	5	
3	Perizinan	7	
4	LingkunganHidup	1	
5	Tender/PengadaanBarangdanJasa / Lelang	0	
6	BadanHukum / Parpol	1	
7	KepalaDesadanPerangkatDesa	0	
8	Kepala Daerah	0	
9	Proses PemilihanUmum	0	
10	PergantianAntarWaktu	0	
11	Ketenagakerjaan	0	
12	SengketaInformasiPublik / KIP	0	
13	Pengadaan Tanah / Perumahan	0	
14	FiktifPositif	0	
15	PenyalahgunaanWewenang	0	
16	TindakanAdministrasiPemerintahan	0	
17	Merk / Haki	0	
18	Lain – Lain	0	
J U M L A H		27	

8. Upaya terkait penerapan Reformasi sebagai berikut ;
 - Upaya penerapan Reformasi dan Birokrasi , profesionalisme dan Integritas pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ,dengan menata ulang Birokrasi memperbaharui berbagai kebijakan Manajemen

Pemerintahan yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi diantaranya dengan memperbaharui dan mengevaluasi 6 (enam) sektor Area sesuai dengan tujuan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menciptakan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), 6 (Area) Perubahan Zona Integritas yang telah dibangun diantaranya :

1. Manajemen Perubahan ;
 2. Penatalaksanaan Tata Laksana ;
 3. Penataan Sistem Manajemen SDM ;
 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja ;
 5. Penguatan Pengawasan ;
 6. Pelayanan Publik.
9. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Hakim berupa kecepatan pembuatan putusan dan kualitas putusan dengan menerapkan inovasi one day publish yaitu Penyelesaian berkas perkara yang telah diputus sampai dengan minutasasi dan di publikasikan di Website Direktori putusan Mahkamah Agung dalam waktu kurang dari 24 jam. Untuk mendukung program tersebut , Hakim dituntut dapat menyelesaikan putusan dengan cepat dan tetap memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum.
10. Upaya terkait Memenuhi Protokol Kesehatan. Dalam Upaya mencegah penyebaran COVID 19 yang semakin meningkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi penambahan dalam cluster perkantoran diantaranya :
- a) Melakukan Sidang Online sudah diterapkan ;
 - b) Telah dianggarkan untuk penyediaan bahan Disinfektan dan Handsanitizer
 - c) Melakukan Penyemprotan secara berkala seminggu 3 (Tiga) kali untuk seluruh ruang kantor dan penyemprotan setiap hari untuk tempat publik dan ruang sidang
 - d) Wajib menerapkan 3 M ;
 - e) Ruang Sidang dan Publik dibatasi ;
 - f) Pertemuan , Pembinaan dilakukan secara Virtual untuk yang bersifat insidental dilaksanakan secara on the spot.
 - g) Jam Kerja selaku ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menentukan jam kerja untuk jam Pulang dipercepat sehingga mengurangi kerumunan yang ditimbulkan.

4. PENGADILAN TINGGI MILITER UTAMA

A. ANGGARAN

1. Penjelasan Kepala Pengadilan Militer Utama di wilayah DKI Jakarta terkait dengan Pagu Definitif yang diterima pada tahun 2021 dan program-program prioritas. Berikut pula kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Pengadilan Militer Utama.

A.1												
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020												
NO	SATUAN	DIPA	BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG			BELANJA MODAL			TOTAL PAGU
			PAGU	REALISASI	SISA	PAGU	REALISASI	SISA	PAGU	REALISASI	SISA	
1	PENGADILAN MILITER UTAMA	O1 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI)	3,880,171,000	3,757,400,157 (96,84%)	122.770.843 (3,16%)	2,237,527,000	2,189,691,859 (97,86%)	47.835.141 (2,14%)	25,000,000	25,000,000 (100%)	-	6,142,698,000
		O5 (DITJEN BADILMILTUN MAHKAMAH AGUNG RI)	-	-	-	461,997,000	438,966,100 (95,01%)	23,030,900 (4,99%)	-	-	-	461,997,000
TOTAL			3,880,171,000	3,757,400,157 (96,84%)	122.770.843 (3,16%)	2,699,524,000	2,628,657,959 (97,37%)	70,866,041 (2,63%)	25,000,000	25,000,000 (100%)	-	6,604,695,000
Kendala												
- Realisasi anggaran terganggu akibat COVID-19												
- Belanja modal tahun anggaran 2020 hanya 0,41% (Rp.25.000.000)												
A.2												
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021 (PER FEBRUARI 2021)												
NO	SATUAN	DIPA	BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG			BELANJA MODAL			TOTAL PAGU
			PAGU	REALISASI	SISA	PAGU	REALISASI	SISA	PAGU	REALISASI	SISA	
1	PENGADILAN MILITER UTAMA	O1 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI)	3,928,399,000	822.825.950 (20,95%)	3.105.573.050 (79,05%)	2,254,371,000	159,668,480 (7,08%)	2,094,702,520 (92,92%)	437,900,000	-	-	6,620,670,000
		O5 (DITJEN BADILMILTUN MAHKAMAH AGUNG RI)	-	-	-	468,063,000	-	468,063,000 (100%)	-	-	-	468,063,000
TOTAL			3,928,399,000	822.825.950 (20,95%)	3.105.573.050 (79,05%)	2,722,434,000	159,668,480 (5,86%)	2,562,765,520 (94,14%)	437,900,000	-	-	7,088,733,000
Program Prioritas : Penyelesaian Perkara												
Dukungan Dana : Rp. 468.063.000,-												

2. Kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dlm upaya optimalisasi tusi yaitu Sidang keliling sebesar Rp. 71.715.000,- dan Pembinaan dan pengawasan sebesar Rp.184.400.000,-.

2. PENGAWASAN

1. Penjelasan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang di lingkungan Pengadilan Militer Utama terkait perkara yang menonjol serta perkara yang masuk dan berapa yang tengah dan telah di selesaikan.

a. Perkara Menonjol

PERKARA CIRACAS	PEMBUNUHAN PENDETAYEREMIAH ZANAMBANI	PEMBAKARAN RUMDIS KESEHATAN	HILANGNYA DUA WARGA SIPIL
<p>Perkara penyerangan Polsek Ciracas dengan Terdakwa sebanyak 78 orang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> TNI AD = 67 orang TNI AL = 10 orang TNI AU = 1 orang <p>Total berkas = 36 berkas perkara</p> <p>Pasal yang didakwakan adalah : Pertama : Ps. 170 (1) Jo (2) ke-1 KUHP atau Kedua : Ps. 351 (1) KUHP Jo Ps. 55 (1) ke-1 KUHP atau Ketiga : Ps. 406 (1) KUHP Jo Ps. 55 (1) ke-1 KUHP.</p> <p>Proses saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.</p>	<p>Penembakan Pendeta Yeremiah Zanambani di Kabupaten Intan Jaya Papua pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020.</p> <p>Perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan Polda Papua dan belum dilimpahkan ke Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih.</p>	<p>Pembakaran 4 Rumdis Kesehatan di Distrik Hitadipa Papua dengan kerugian ditaksir sekitar Rp. 1,3 Milyar.</p> <p>Tersangka 8 orang dan terbagi menjadi 3 berkas</p> <p>Pasal yg didakwakan adalah : Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>Proses saat ini 2 berkas sudah dilimpahkan ke Dllmil III-19/JYP dengan 5 Terdakwa.</p> <p>1 berkas belum dilimpahkan karena 3 Tersangka masih melaksanakan tugas Latihan di LN.</p>	<p>Pembunuhan dan pembakaran 2 warga sipil a.n. Sdr Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani.</p> <p>Tersangka terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pamen 2 orang Pama 2 orang Bintara 6 orang Tamtama 1 orang <p>Dugaan Pasal yg dilanggar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo ayat (2) ke-3 KUHP; Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Pasal 181 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP; Pasal 132 KUHPM. <p>Proses saat ini masih dalam tahap penyidikan oleh penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih.</p>

1. Pada Tahun 2020 Dilmiltama telah melaksanakan sidang keliling sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1) Dilaksanakan di Aceh yaitu Perkara Tingkat Banding atas nama Teuku Andi Kurniawan, Mayor Inf NRP 11050041291083 (Wadan Den Intel) pada tanggal 28 s.d. 30 September 2020 di ruang sidang Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan agenda mendengarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Pelaksanaan sidang keliling tersebut sesuai Surat Perintah Kadilmiltama Nomor Sprin/399/IX/2020 tanggal 22 September 2020.

- 2) Dilaksanakan di Manado yaitu perkara tingkat Banding atas nama Hanif Bachdim, Letkol Inf NRP 11990031020275 (Pamen Kodam XIII/MDK) pada tanggal 18 s.d. 20 November 2020 di ruang sidang Pengadilan Militer III-17 Manado dengan agenda mendengarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Pelaksanaan sidang keliling tersebut sesuai Surat Perintah Kadilmiltama Nomor Sprin/496/XI/2020 tanggal 17 November 2020.
2. Data terkait penyelesaian Perkara di Tahun 2021;

PERKARA DI DILMIL SELURUH INDONESIA TAHUN 2021		PERKARA DI DILMILTAMA TAHUN 2021	
Perkara Kejahatan	Perkara Pelanggaran	Perkara Banding Pidana	Perkara Perbedaan pendapat
1. Sisa kara thn 2020 : 112 Perkara 2. kara masuk thn 2021: 239 Perkara 3. Putus : 86 Perkara 4. Kembali : 0 Perkara 5. Putus No : 2 Perkara 6. Sisa kara thn 2021 s.d skrg : 263 Perkara	3. Sisa kara thn 2020 : 0 Perkara 4. Kara masuk thn 2021: 41 Perkara 3. Putus : 41 Perkara 4. Kembali : 0 Perkara 5. Sisa kara tahun 2021 s.d skrg : 0 Perkara	1. Sisa tahun 2020 : - perkara 2. Perkara masuk tahun 2021 : 2 perkara 3. Putus : 2 perkara 4. Dikembalikan : - perkara 5. Sisa tahun 2021 s.d skrg : - perkara 6. Menguatkan : 1 putusan 7. Memperbaiki : 1 putusan 8. Membatalkan : - putusan 9. Tidak dapat diterima : - putusan 10. Penyelesaian perkara < 3 bulan = 2 Perkara.	1.Sisa kara tahun 2020: - perkara 2. Perkara masuk tahun 2021: 1 perkara 3. Putus : 1 Perkara 4. Dikembalikan : - perkara 5. Sisa tahun 2021 s.d skrg : - perkara 6. Perkara PP yang disidang : 1 perkara 7. Perkara PP yang dikembalikan : - perkara

5. Penjelasan tentang upaya yang dilakukan dalam rangka memenuhi protokol Kesehatan melalui penyelenggaraan sidang *online* maupun *e-court* serta berbagai Kendala dan hambatan yang perlu menjadi perhatian.

NO	DASAR HUKUM	UPAYA MEMENUHI PROTOKOL KESEHATAN DAN PENYELENGGARAAN SIDANG ONLINE
1. 2.	Surat Edaran KMA Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pedoman pelaksanaan tugas selama masa penyebaran corona virus disease (Covid-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 29 September 2020 tentang Administrasi dan persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik.	1. Penekanan pelaksanaan 3M (Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak); 2. Penyediaan tempat cuci tangan, hand sanitizer di dalam lingkungan kantor dan pengukur suhu tubuh; 3. Pengaturan jam kerja; 4. Melaksanakan ketentuan Work from office (WFO) dan Work from Home (WFH) sesuai ketentuan dari Pemerintah Daerah; 5. pelaksanaan sidang secara elektronik Pengadilan Militer dan jajarannya selalu melakukan kordinasi dengan Oditurat Jenderal TNI dan Pengadilan lain di seluruh Indonesia namun demikian kendala yang ditemui adalah belum adanya sarana dan prasarana untuk melaksanakan sidang secara elektronik, oleh karena itu saat ini Dllmiltama sedang mengajukan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan sidang online yang disebut <i>Military Court Integrated System</i> (MCIS)

Pendalaman/ Tanya Jawab:

- Terkait dengan laporan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait dengan anggaran perlu komunikasi dengan MA, program Prioritas dari PT. Rancangan undnag-undang sudah masuk proleknas.
- Berapa kali PT dki lockdown? Bagaimana PT mensiasati hal tersebut.
- Pengadilan Online mulai di lakukan namun ada kelemahan dalam menghadirkan saksi.
- Terkait memberikan keadilan kepada pencari keadilan, rasa yang tidak aman, memulihkan keadaan.
- Berapa kasus baik perdata, pidana, TUN yang sudah keputusan tetap tetapi tidak dieksekusi ?
- Undang-undnag Kepailitan tidak bisa diajukan upaya hukum tidak boleh. Tapi sistem hukum luar biasa demi keadilan selalu dibuka.
- Hakim dipengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum administrasi dan dukungan tugas memberikan keadilan.

Jawaban/ Tanggapan :

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta:

- Berkaitan dengan eksekusi perkara perkara perdata yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), akan tetapi belum dieksekusi, ada beberapa hal penyebabnya:
 1. Kedua belah pihak telah menyelesaikan sendiri tanpa melalui Pengadilan, sehingga Pengadilan tidak lagi mengetahui perkembangannya;
 2. Di dalam amar putusan tidak ada perintah penghukuman (Condemnator), sifatnya hanya deklaratator saja (NON EKSEKUTABLE);
 3. Adanya perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) atas dasar Hak Milik. Di dalam praktek biasanya di tunda, karena secara formil lembaga ini memang ada. Tetapi apabila nyata nyata tidak akan di kabulkan (sesuai buku II), eksekusi dilanjutkan Oleh karena itu majelis selalu berkoordinasi dgn ketua tentang perkembangan perlawanan yang di tangani, atau setidaknya sampai pada putusan PN yang putusannya di tolak;
 4. Obyek sengketa yang akan di eksekusi sudah berubah, misalnya pada saat sengketa masih kosong dan ketika di eksekusi terdapat beberapa rumah;
 5. Perkara tersebut di ajukan Permohonan Peninjauan Kembali;
 6. Secara hukum memang Peninjauan kembali tidak menunda Eksekusi, akan tetapi apabila dirasa dikabulkan (kasuistis) maka eksekusi di tangguhkan;
 7. Obyek yang akan di eksekusi tidak jelas baik batas, luas maupun batas batasnya;

8. Termohon eksekusi tidak memiliki harta apapun, berkaitan dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang;
- Berkaitan Covid 19 dan Kebijakan Lockdown, apabila terdapat seseorang atau beberapa orang yang terpapar covid 19 dalam salah satu satker, setelah menerima laporan tertulis, kami mempertimbangkan untuk melakukan lockdown atau Pembatasan Kegiatan Terbatas (tidak seluruhnya) dengan menerapkan bekerja dari rumah (WFH).
 - Berkaitan dengan eksekusi perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebagai eksekutor adalah Jaksa Penuntut Umum, sedangkan Peran Pengadilan dalam hal Ini Pengadilan Negeri hanya sebagai Pengawas saja, sebagaimana yang dilakukan oleh Hawasmat (Hakim Pengawas dan Pengamat);
 - Berkaitan Pelaksanaan Online, Mahkamah Agung telah membrikan respon secara cepat dengan mengeluarkan beberapa regulasi diantaranya:
 1. PERMA NO. 1 TAHUN 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik;
 2. SEMA NO. 1 TAHUN 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama masa Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada di bawahnya;
 3. SEMA NO. 6 TAHUN 2020 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya , dalam Tatanan Normal Baru .
 - Berkaitan dengan E- Court, telah diatur di dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang mencabut PERMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. E - Court ini tidak ada hubungannya dengan pandemi covid - 19, karena dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan muncul sebelum pandemi corona.

Pengadilan Tinggi Militer Utama :

- Berkaitan Berkekuatan Hukum Tetap dalam pelaksanaan eksekusi sangat berbeda dengan pengadilan lain dan tidak ada perkara yang tidak dilaksanakan eksekusinya, terpidana minta eksekusi cepat dilaksanakan karena takut kehilangan hak-hak mereka.
- Terkait dengan perkara narkoba semua dipecat.
- Hukum yang paling berat di Pengadilan Tinggi Militer Utama adalah diberhentikan secara tidak hormat.

- Terkait Komisi Yudisial merupakan campur tangan Legislative ke Eksekutif perlu menjadi perhatian kita Bersama kedepan.

C. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi DKI Jakarta yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi Komisi III DPR RI dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ini, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan Mitra Kerja Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan yang akan datang.

Jakarta, Februari 2021
Ketua Tim Kunjungan Kerja
Komisi III DPR RI,
Pimpinan,